



DIY Ingin Mudik Diperketat

JOGJA-Pemda DIY mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar memperketat syarat mudik.

*Sunartono, Jalu Rahman Dewantara & Luqas Subarkah
redaksi@harianjogja.com*

Usulan itu berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat memberikan sinyal tidak melarang pemudik di 2020 meski di tengah penyebaran virus Corona.

Kepala Dinas Perhubungan DIY, Tavip Agus Rayanto, menjelaskan Pemerintah Pusat memilih untuk memberikan imbauan agar tidak mudik tetapi tidak melarang mudik. Hal ini tentu

Pemerintah Pusat memilih memberikan imbauan agar tidak mudik tetapi tidak melarang mudik.

Pemerintah kalurahan yang terletak di kawasan perbukitan di Kulonprogo cukup kesulitan mengawasi pelaksanaan karantina mandiri warga.

dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama agar ada pertumbuhan ekonomi.

Namun, kata Tavip, harus ada pengaturan terutama untuk bisa mudik, salah satunya wacana setiap angkutan hanya boleh membawa 50% dari total kuota sehingga konsekuensinya adalah

kenaikan biaya. "Bahasanya boleh mudik tetapi dipersulit. Misalnya angkutan moda transportasi boleh mengangkut penumpang dengan kapasitas 50 persen, misalnya bus 50 ya hanya boleh 25 penumpang, enggak boleh lebih. Kemudian kedua, dari sisi biaya, tentu ada yang dikonversi biaya lebih mahal," katanya Sabtu (4/4).

Tavip menambahkan Pemda DIY menyarankan agar ada sejumlah ketentuan lain seperti pengaturan mobil pribadi bagi pemudik agar bisa dipantau. Termasuk jumlah manifes di angkutan atau mobil pribadi pemudik harus sesuai dengan yang diangkut agar tidak melebihi ketentuan.

Instansi Nilai ▶ Halaman 6 Lan

bn. Pertumbuhan □ Monev □ Ases □ Uraian

DIY Ingin...

Sehingga saat operasi mudik Lebaran bukan sekadar merazia, tetapi juga harus sampai pada mengontrol jumlah penumpang. "Kemudian misalnya satu mobil hanya boleh tiga orang, satu sopir dua penumpang, tetapi ini, baru bisa menjadi kebijakan ketika sudah diputuskan. Ini kan baru dirapatkan," katanya.

Selain itu, Pemda DIY akan mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk memperketat protokol kesehatan bagi pemudik. Pemudik dari zona merah harus membawa surat keterangan sehat dari dokter. Hal ini untuk memudahkan kota tujuan pemudik, karena diprediksi akan kewalahan jika hanya mengandalkan karantina.

"Pemudik dari zona merah di dibolehkan sekiranya membawa surat dokter. Artinya untuk memudahkan, karena jumlah orang mudik kan banyak. Itu kalau dibolehkan. Kami akan kewalahan kalau menyediakan karantina dan sebagainya. Protokol kesehatan harus diperketat, kemudian mobil membawa manifestasi, harus dicek orang per orang, ini yang sedang kami usulkan," ujarnya.

Pemda DIY juga menyarankan kepada Pemerintah Pusat agar angkutan umum antarkota antarprovinsi (AKAP) memiliki kewajiban menurunkan penumpang di terminal dengan tidak memperbolehkan menurunkan penumpang di tengah jalan. Tujuannya agar memudahkan penantauan bagi para pemudik jika langsung di terminal dengan data yang lebih akurat.

"Kami mengusulkan agar bus tidak boleh menurunkan penumpang di tengah jalan tetapi harus di terminal, sehingga bisa dideteksi, karena AKAP kewenangan Pusat," katanya.

Senyampang dengan keinginan Pemda DIY, Pemerintah Pusat akan mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meminimalisasi penyebaran virus Corona. Pemerintah akan memperketat mudik, salah satunya terkait dengan implementasi jaga jarak fisik.

Adapun jaga jarak fisik tersebut di antaranya dilakukan dengan mengurangi kapasitas penumpang, baik penggunaan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Salah satu contohnya ialah pada kendaraan umum di mana kapasitas penumpangnya dibatasi lalu harga tiket dinaikkan.

Transportasi umum dan pribadi diperlukan untuk mengimplementasikan jaga jarak fisik. Seperti untuk kendaraan umum, menaikkan harga tiket angkutan umum. Misalnya, bus berkapasitas 50 hanya dapat menampung 25 orang, itu harga tiketnya dinaikkan," kata Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ridwan Djamiluddin dalam keterangannya, Minggu.

Sedangkan untuk kebijakan kendaraan pribadi, Ridwan memaparkan, seperti untuk sepeda motor tidak dapat membawa penumpang. Sedangkan, untuk mobil pribadi harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas penumpangnya. "Semua tindakan ini akan diberlakukan secara ketat oleh polisi lalu lintas dan

Kementerian Perhubungan," ungkapnya.

Selain itu, jelas Ridwan, setiap orang yang melaksanakan mudik juga diharuskan untuk isolasi mandiri selama 14 hari setelah kedatangan di kota tujuan dan 14 hari setelah kembali ke Jakarta atau kota lain tempat mereka kembali. Dalam hal ini pemerintah daerah diwajibkan untuk mendirikan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan.

"Dengan langkah-langkah ini, jumlah orang yang kembali ke kampung halaman mereka tahun ini diperkirakan rendah," jelasnya.

Karantina Pendatang

Di kabupaten/kota di DIY karantina ke pemudik sudah dilakukan. Sejumlah kendala muncul salah satunya pemerintah kalurahan yang terletak di kawasan perbukitan di Kulonprogo cukup kesulitan mengawasi pelaksanaan karantina mandiri bagi warga yang masuk kriteria orang dalam penantauan (ODP) dan orang dalam catatan (ODC).

Hal ini dialami Pemerintah Kalurahan Banjaraya, Kapanewon Kalibawang. Hingga Sabtu (4/4), jumlah ODP di kalurahan ini sebanyak satu orang. Sementara jumlah ODC yang terdiri dari pendatang dan pemudik mencapai 40 orang.

Pemerintah kalurahan telah menugaskan seluruh dukuh, ketua RW dan ketua RT untuk mengawasi pergerakan para ODP dan ODC tersebut. Pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan ODP dan ODC tetap berada di rumah selama masa karantina.

Namun dalam praktiknya, pengawasan ini tidak bisa berjalan optimal karena terkendala faktor geografis. "Karena kondisi di pegunungan yang jarak antarrumah jauh dan akses jalan juga banyak, akibatnya pengawasan tidak bisa diandalkan," ujar PJ Lurah Banjaraya, Senja, Minggu.

Imbasnya kata Senja, sebagian warga yang harusnya melakukan isolasi mandiri justru bebas berkelir. "Kalau yang paham ya tertib melapor dan tertib isolasi mandiri, tapi kalau yang tidak tertib ya pada berkelir," ucapnya.

Menurut Senja, yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini adalah kesadaran masyarakat khususnya para ODP dan ODC untuk mau karantina mandiri. Percuma Senja dan perangkatnya mengawasi jika yang diawasi tetap bebas dengan nekat keluyuran sehingga meningkatkan potensi penyebaran virus.

Adapun, Lurah Cokrodiningratan, Kota Jogja, Narotama, menuturkan di wilayahnya terdapat 69 pendatang, yang terdiri dari warga asli sebanyak 19 orang dan warga dari luar daerah sebanyak 50 orang.

Untuk menantau para pendatang ini, Narotama telah membuat grup *whatsapp* yang berisi pengurus RT, RW, Kampung dan Kelurahan Tangguh Bencana (KTB). "Setiap ada yang datang langsung melapor ke RT dan disampaikan ke grup, lalu kami masukkan ke data pendatang," ujarnya.

Kondisi para pendatang ini hampir semuanya sehat, dengan satu di antaranya sakit dan dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih, satu lagi pernah dites corona dan telah dinyatakan negatif

pada Senin (23/3) lalu. "Status pendatang semua ODP, kalau ada yang meningkat jadi PDP langsung kami komunikasikan dengan rumah sakit," katanya.

Berdasarkan pemantauannya sejauh ini, para pendatang ini mematuhi kewajibannya untuk tidak keluar rumah, meski demikian, ia sempat mendapat keluhan dari beberapa pendatang karena mereka datang ke keluarganya ingin membantu bekerja, tapi tidak bisa karena harus karantina.

Namun ia memaklumi para pendatang ini mendatangi keluarganya karena kondisi di perantauan mereka juga tidak bisa bekerja dan kebutuhannya tidak terjamin. Untuk memastikan mereka tidak keluar rumah, ketua RT dan tetangga berkewajiban ikut mengawasi.

Dalam karantina, para pendatang ini juga butuh makan. Keluarganya yang serumah berkewajiban menyediakan makanan, atau membelikan dari luar. "Kami sudah kerja sama dengan warung-warung juga, agar untuk para pendatang, kalau bisa makanannya diantarkan."

Tim Sukarelawan

Peran Tim Sukarelawan Covid-19 yang dibentuk desa sangat penting dalam upaya mencegah penyebaran virus Corona. Salah satunya terlihat di Desa Watuisigar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Di desa ini terdapat 107 perantau yang pulang ke kampung halaman di tengah pandemi Covid-19. Sesuai dengan imbauan dari Pemkab, pemudik yang terlanjur pulang diwajibkan menjalani karantina mandiri selama 14 hari.

Sekretaris Desa Watuisigar, Karsimin mengatakan tim Sukarelawan Covid-19 tidak hanya menyosialisasikan upaya pencegahan, baik melalui penyuluhan maupun penyemprotan cairan disinfektan di desa. Namun, tim juga berperan dalam mengawasi pemudik yang pulang kampung.

Ia mengakui tidak semua pemudik mematuhi. Menurut catatannya ada lima keluarga pemudik yang nekat keluar rumah di masa karantina. Guña mengantisipasi keresahan masyarakat akan penyebaran Corona, Sukarelawan Covid-19 pun turun tangan memberikan pemahaman dan penjelasan kepada pemudik yang bandel di masa karantina mandiri.

Sementara itu, Pemerintah Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Bantul memenuhi kebutuhan ODP. Kepala Desa Sumbermulyo, Ani Widayani mengatakan kebutuhan makanan tiga kali dalam sehari selalu diantar ke rumah karantina oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat dusun tempat karantina itu berada. "Minuman selain air mineral, kami juga sediakan gula dan teh, sabun mandi dan sabun cuci, masker, dan obat-obatan" kata Ani.

Selain itu, Desa Sumbermulyo juga menyediakan 850 paket sembako untuk warga miskin yang terdampak langsung dari adanya pembatasan aktivitas selama pandemi Corona. (Ujang

Hasanudin dan David Kurniawan)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005